

Judul : Masyarakat Kudu Siap-siap Beli Deterjen Lebih Mahal Karena Bakal Ada Cukainya
Tanggal : Rabu, 15 Juni 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Masyarakat Kudu Siap-siap Beli Deterjen Lebih Mahal Karena Bakal Ada Cukainya

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang mengkaji rencana pengenaan cukai untuk beberapa produk.

Yaitu, Bahan Bakar Minyak (BBM), ban karet dan deterjen, dalam rangka mengurangi tingkat konsumsinya.

"Yang sedang kami kaji beberapa konteks ke depan dalam hal pengendalian konsumsi seperti BBM, ban karet dan deterjen," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam rapat dengan DPR, seperti diberitakan Antara, Senin (13/6).

Febrio menjelaskan, hal tersebut turut dilakukan karena potensi penerimaan negara dari sisi kepabeanan dan cukai, masih dapat dioptimalkan melalui ekstensifikasi Barang Kena Cukai (BKC).

Pernyataan Febrio mendapatkan dukungan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno. Kata Hendrawan, cukai akan memperkuat basis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Tahun 2021, PNBP mencapai Rp 450 triliun, lebih tinggi sekitar Rp 150 triliun dibanding 2017. Dengan ekstensifikasi dan intensifikasi

pemungutan, angkanya akan bertambah.

Menurutnya, dari penerimaan bea cukai 2021 sebesar Rp 268 triliun, cukai berkontribusi Rp 195 triliun (73 persen). Dari angka ini, cukai tembakau menyumbang sekitar 98 persen.

"Jadi, ada kesadaran agar ketergantungan terhadap cukai hasil tembakau dikurangi dengan memperluas basis percukaian," ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Bahkan, lanjut Hendrawan, dibandingkan negara-negara lain dengan ekonomi yang setara (seperti Thailand), jenis cukai yang ada di

Indonesia sangat sedikit.

"Padahal kita sadar, banyak produk yang berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan dan lingkungan, yang konsumsinya perlu dikendalikan," tuturnya.

Cukai deterjen ini menguntungkan bagi Pemerintah. Tapi, masyarakat harus merogoh kocek lebih dalam karena harga deterjen berpotensi naik jika dikenakan cukai.

Untuk membahas hal ini lebih lanjut, berikut wawancara dengan anggota Komisi XI DPR M Misbakhun dari Fraksi Partai Golkar dan Anis Byarwati dari PKS.

ANIS BYARWATI
Anggota Komisi XI DPR

Jangan Cuma Naikin Penerimaan Negara



“

Memang dampak terhadap lingkungan hidup juga harus dipikirkan. Tapi, dengan berbagai pertimbangan analisis dampak, risiko dan solusi yang tepat. Perlu dicatat, cukai bukan aspek pokok untuk menggenjot penerimaan negara.

Kemenkeu sedang mengkaji tiga jenis barang yang akan dikenakan cukai. Yakni, ban karet, BBM dan deterjen. Pendapat Anda?

Cukai ini memang sifatnya selektif dan diskriminatif. Artinya, tidak semua barang bisa dikenakan cukai. Hanya barang yang memenuhi beberapa ciri atau karakteristik tertentu dapat dikenakan cukai.

Barang yang dikenakan cukai kriterianya apa saja?

Bisa karena konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya menimbulkan dampak negatif, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Salah satu tujuan cukai untuk penerimaan negara. Anda setuju?

Salah satu yang saya garis bawahi adalah, jangan sampai cukai dikenakan semata-mata untuk meningkatkan penerimaan negara.

Kan ada faktor dampak lingkungan...

Memang dampak terhadap lingkungan hidup juga harus dipikirkan. Tapi, dengan berbagai pertimbangan analisis dampak, risiko dan solusi yang tepat. Perlu dicatat, cukai bukan aspek pokok untuk menggenjot penerimaan negara.

Maksud Anda, cukai ini akan memberatkan masyarakat?

Iya, apalagi masyarakat masih re-

sah dengan naiknya harga berbagai macam bahan pokok, isu kenaikan tarif listrik dan lain-lain.

Jika cukai deterjen ini diterapkan, apakah akan membuat rakyat panik?

Iya, sekarang ibu-ibu semakin panik dengan wacana deterjen akan menjadi objek cukai baru. Kepanikan ini sangat wajar, karena akan berdampak pada kenaikan harga deterjen yang sudah menjadi bahan kebutuhan pokok rumah tangga.

Apa pesan Anda kepada Pemerintah?

Pemerintah harus ekstra hati-hati mengeluarkan berbagai wacana yang berdampak langsung pada masyarakat. ■ REN

M MISBAKHUN

Anggota Komisi XI DPR

Dampak Lingkungan Perlu Diperhitungkan

“

Saya sejak awal mendukung upaya penambahan objek cukai baru, dengan argumentasi yang memadai terkait ekonomi eksternalitinya. Yakni, dampak negatif terhadap lingkungan atau kesehatan masyarakat perlu diperhitungkan.



Pemerintah berencana kenaikan cukai untuk deterjen, ban karet dan BBM. Bagaimana tanggapan Anda?

Saya sejak awal mendukung upaya penambahan objek cukai baru, dengan argumentasi yang memadai terkait ekonomi eksternalitinya.

Yakni, dampak negatif terhadap lingkungan atau kesehatan masyarakat perlu diperhitungkan.

Bagaimana dengan cukai deterjen?

Mengenai rencana deterjen dikenakan cukai, harus bisa dijelaskan secara detail risetnya dan dampak lingkungannya. Apakah pantas dikenakan cukai.

Bagaimana jika bisa dijelaskan?

Kalau Kemenkeu punya riset dan bisa menjelaskan, maka saya akan memberikan dukungan.

Jika deterjen dikenakan cukai, harganya naik dong...

Dampak pengenaan cukai terhadap sebuah objek cukai baru, memang ada kenaikan harga. Karena, cukai dikenakan terhadap harga eceran barang.

Semakin menambah beban masyarakat ya?

Terkait kenaikan harga itu, tergantung kepada produsen, apakah dibebankan kepada konsumen atau ditanggung produsen sehingga mengurangi keuntungan. Ataukah dibagi

pembebanannya antara pengurangan keuntungan dan menaikkan harga, sehingga tak sepenuhnya jadi beban konsumen.

Saran Anda?

Cukai selalu menjadi beban konsumen. Tapi, dalam struktur harga, cukai bisa dibagi rata antara produsen dan konsumen. Supaya, tidak menjadi beban konsumen atau produsen sepenuhnya.

Apa masukan Anda untuk Pemerintah?

Terkait objek cukai baru, Ibu Menteri Keuangan harus berani membuka wacana pengenaan cukai atas konsumsi BBM. ■ REN